BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

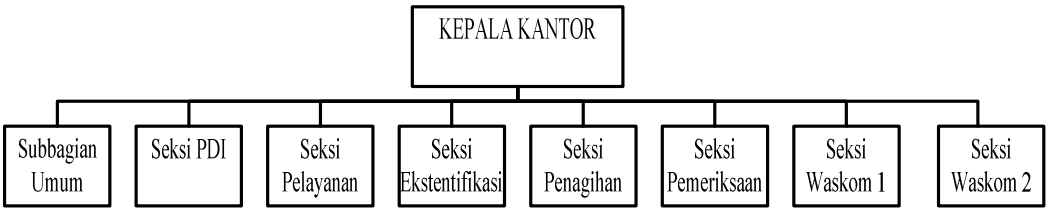
3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Organisasi Direktorat Jenderal Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu, Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan perundang-undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah, Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang-barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara, Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu Jawatan Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan; dan Jawatan Pajak Hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Ditjen Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Dengan keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1976 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang-undang RI No. 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi Ipeda diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Dinas Luar Ipeda diganti menjadi Kantor Dinas Luar PBB.

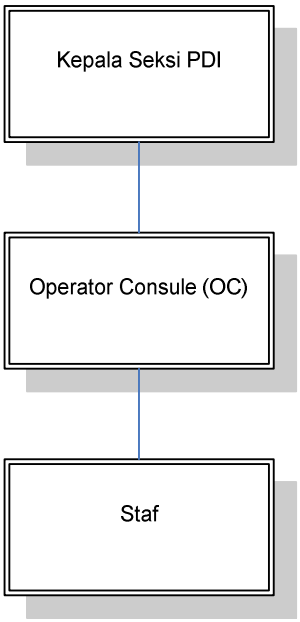
Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ItDa) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Inspektorat Daerah ini kemudian menjadi Kanwil Ditjen Pajak (Kantor Wilayah) seperti yang ada sekarang ini.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang merupakan kantor pembentukan baru sejak tanggal 28 agustus 2007 yang merupakan pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Karees dan Kantor Pelayana Pajak Bumi dan Bangunan Garut, adalah instasi vertikat Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah pengawasan dan bimbingan kantor Wilayah DJP Jawa Barat I yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang Perpajakan dengan pelayanan kelas dunia dengan penerapan sistem administrasi modern, serta berusaha menerapkan trisukses yaitu sukses data, sukses pelayanan, dan sukses penerimaan, dalam mendukung tercapainya sasaran “Terlaksananya Optimalisasi Dalam Negeri dari Sektor Pajak Sehingga Dapat Tercapainya Target Tax Ratio 19% Sampai Dengan Tahun 2009” dan mengamankan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh APBN

3.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Sumedang



Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Sumedang



Gambar 3.2
Struktur Organisasi Seksi PDI diKPP Pratama Sumedang

3.3 Deskripsi Kerja

Deskripsi kerja merupakan pembagian tugas atau tugas-tugas yang dilakukan di setiap bagian.

Deskripsi kerja di Seksi PDI :

- Kepala Seksi

  Mengarahkan, mengawasi yang harus dikerjakan oleh Staf dan OC

- Operator Consule (OC)

  Mengoprasikan server SI DJP dan Sismiop, serta melakukan bantuan teknis terhadap karyawan KPP dalam melaksanakan tugasnya

- Staff

  Melakukan tugas yang diperintahkan oleh kepala seksi

3.4 Visi dan Misi

Visi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi Institusi pemerintah yangmenyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Misi Direktorat Jenderal Pajak

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3.5 Produk DJP

1. Permohonan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Permohonan Perusahaan Data Indentitas Wajib Pajak
3. Permohonan Pindah Di KPP Lama
4. Permohonan Pindah Di KPP Baru
5. Surat Keberatan PPH/PPN/ppnpb
6. Pembetulan Ketetapan PPH/PPN/ppnpb
7. Permohonan Penghapusan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi PPH/PPN/ppnpb
8. Permohonan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar PPH/PPN/ppnpb
9. Permohonan Pengangsuran Tunggakan Pajak
10. Permohonan Penundaan Pembayaran / Jatuh Tempo Pembayaran PBB
11. Permohonan Penghapusan Sanksi Bungan Penagihan
12. Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
13. Mutasi Objek/Subjek Pajak PBB
14. Pembetulan SPPT/SKP/STP PBB
15. Pembatalan SPPT/STP PBB
16. Salinan SPPT/STP PBB
17. Keberatan Pajak Terutang (SPPT PBB)
18. Pengurangan pajak terutang (SPPT PBB)
19. Validasi BPHTB
20. Restitusi/Kompensasi PBB
21. Restitusi/Kompensasi BPHTB
22. Pengurangan denda administrasi PBB

23. Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran PBB
24. keberatan penunjukan WP PBB
25. Permohonan Surat Keterangan Fiskal
26. Permohonan Pemindahbukuan
27. Permohonan SKB PPnBM Impor
28. Permohonan Restitusi